

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	27
1.3. Tujuan Penelitian	27
1.4. Keaslian Penelitian	27
1.5. Manfaat Penelitian	29
1.5.1. Manfaat Teoritis	29
1.5.2. Manfaat Praktis	30
1.6. Sistematika Penulisan	30
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	34
2.1. Landasan Teori	34
2.1.1. Teori Tujuan Hukum	35
2.1.2. Teori Perlindungan Hukum	40
2.1.3. Teori Hukum Progresif	48

2.2. Landasan Konseptual	52
2.2.1. Bentuk dan Jenis Data Pribadi	52
2.2.2. Pelindungan Data Pribadi	56
2.2.3. Pengertian Delik Pidana dan Jenis-Jenis Delik Pidana	83
2.2.4. Konsepsi tentang Pidana dan Pemidanaan	87
2.2.5. Sanksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana	107
2.2.6. Penerapan Sanksi Pidana	117
2.2.7. Hukum Positif di Indonesia	126
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	132
3.1. Jenis Penelitian	132
3.2. Data Penelitian	132
3.2.1. Data Primer	133
3.2.2. Data Sekunder	134
3.2.2.1. Bahan Hukum Primer	134
3.2.2.2. Bahan Hukum Sekunder	136
3.2.2.3. Bahan Hukum Tersier	136
3.2.2.4. Bahan Non-Hukum	137
3.2.3. Pengolahan Data	137
3.3. Teknik Pengumpulan Data	137
3.4. Analisis Data	138
3.5. Pendekatan Penelitian	138
BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS	141
4.1. Pengaturan Pembentukan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia	141
4.1.1. Sejarah Penyusunan UU PDP	141
4.1.2. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Penyusunan UU PDP	146
4.1.3. Hak Asasi Manusia Sebagai Landasan UU PDP	150

4.1.4. Urgensi Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	
tentang Pelindungan Data Pribadi	156
4.1.4.1. Proses Pembahasan UU PDP	158
4.1.4.2. Jangkauan dan Sasaran UU PDP	159
4.1.5. Pokok-Pokok Materi Muatan UU PDP	161
4.1.5.1. Ketentuan Umum, Asas, dan Jenis Data Pribadi ...	163
4.1.5.2. Hak Subjek Data Pribadi.....	172
4.1.5.3. <i>Legal Basis</i> Pemrosesan Data Pribadi.....	193
4.1.5.4. Kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi.....	202
4.1.5.5. Sanksi Administratif	215
4.1.5.6. Lembaga Pelindungan Data Pribadi	216
4.1.5.7. Kerjasama Internasional	220
4.1.5.8. Partisipasi Masyarakat	220
4.1.5.9. Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara.....	221
4.1.5.10. Larangan Penggunaan Data Pribadi	222
4.1.5.11. Ketentuan Pidana	224
4.1.5.12. Ketentuan Peralihan dan Penutup	228
4.1.6. Perbandingan Regulasi Pelindungan Data Pribadi di Beberapa Negara	229
4.1.7. Temuan Hasil Penelitian Yuridis Normatif.....	255
4.2. Implementasi UU PDP.....	267
4.2.1. Penerapan Sanksi Pidana mengenai Data Pribadi Sebelum dan Sesudah adanya UU PDP	267
4.2.1.1. Penerapan Sanksi Pidana mengenai Data Pribadi Sebelum adanya UU PDP.....	267
4.2.1.2. Penerapan Sanksi Pidana mengenai Data Pribadi Setelah Adanya UU PDP.....	276
4.2.1.3. Posisi Kasus Penerapan Sanksi Pidana UU PDP Pada Putusan Nomor:5/Pid.Sus/2023/PN.Krg	277

1) Pertimbangan Majelis Hakim	277
2) Analisa Kasus	287
4.2.2. Praktek Pelaksanaan Pengelolaan Pelindungan Data Pribadi	295
4.2.3. Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability) Dalam UU PDP	301
4.2.4. Pihak-Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana dalam UU PDP	306
4.2.4.1. Pertanggungjawaban Pidana Perseorangan	306
4.2.4.2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	309
4.2.5. Tantangan dan Hambatan Implementasi UU PDP	316
4.2.6. Penerapan Delik Pidana Dalam UU PDP	322
4.2.7. Perbandingan Pelaksanaan Pengaturan Sanksi Pidana dan Beberapa Contoh Kasus	330
1) Singapura	330
2) Malaysia	333
3) Filipina	335
4) Thailand	336
5) Hongkong	339
6) Finlandia	341
7) Amerika Serikat	342
8) Negara Uni Eropa	349
4.2.8. <i>Lesson Learned</i>	358
4.3. Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Pelindungan Data Pribadi yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan	362
4.3.1. Kebutuhan Pengaturan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perumusan Kebijakan di bidang Pelindungan Data Pribadi	379
4.3.1.1. Kebijakan Dalam Perspektif Kepastian Hukum	383
4.3.1.2. Kebijakan Dalam Perspektif Keadilan	387
4.3.2. Kebijakan Klasifikasi Delik Pada UU PDP	390

4.3.2.1. Delik Aduan Sebagai Opsi	394
4.3.2.2. Delik Aduan Dalam Perspektif Teori Hukum Progresif.....	395
4.3.3. Perbandingan Pengaturan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi di Beberapa Negara	403
4.3.4. Pandangan Para Ahli	415
4.3.5. Ketentuan mengenai Sanksi Pidana dalam UU PDP	426
4.3.5.1. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dalam UU PDP	426
4.3.5.2. Perbandingan Ketentuan Sanksi Pidana Dalam UU PDP dengan UU ITE	437
4.3.6. Sanksi Pidana Dalam UU PDP sebagai Ultimum Remedium	442
BAB V : PENUTUP	448
5.1. Kesimpulan	448
5.2. Saran	452
DAFTAR PUSTAKA	457
DAFTAR RIWAYAT	474

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Halaman
2.1.	Tiga Nilai Dasar Tujuan Hukum	36
4.1.	Proses Pembahasan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi	158
4.2.	Pokok-Pokok Muatan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi	161
4.3.	Jenis-Jenis Tingkatan Data Pribadi	172

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Halaman
2.1.	Hubungan Teori Hukum Progresif Dengan Pelindungan Data Pribadi	49
4.1.	Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran	111
4.2.	Sanksi Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia	116
4.3.	Jenis Perbuatan yang Dilarang (Tindak Pidana) dan Pengenaan Sanksi Pidana pada UU PDP	331
4.4.	<i>Lesson Learned</i> Perbandingan Regulasi <i>Data Protection</i> di beberapa Negara	363
4.5.	Irisan antara UU ITE dengan UU PDP	436

DAFTAR SINGKATAN

AFTECH	Asosiasi Fintech Indonesia
APEC	Asia-Pacific Economic Cooperation
APJII	Asosiasi Penyelenggara jasa Internet Indonesia
APPDI	Asosiasi Pejabat Pelindungan Data Pribadi
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
BCR	Binding Corporate Rules
BRI	Bank Rakyat Indonesia
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
CCPA	California Consumer Privacy Act (CCPA)
CNIL	National Commission on Information and Liberty
COVID-19	Coronavirus Disease 2019
CoE	Council of Europe
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
ECHR	European Convention on Human Rights
E-HAC	Electronic Health Alert Card
EU	European Union
FIPPs	Fair Information Practice Principles
GDPR	General Data Protection Regulation
HAM	Hak Asasi Manusia
ICCPR	International Convention on Civil and Political Rights
ISO	International Organization for Standardization
JPU	Jaksa Penuntut Umum
KBGO	Kekerasan Online Berbasis Gender
KK	Kartu Keluarga
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PCPD	Privacy Commissioner for Personal Data
PDPA	Personal Data Protection Act
PDPO	Personal Data Privacy Ordinance
PIPA	Personal Information Protection Act
PIPEDA	Personal Information Protection and Electronic Act
PERPRES	Peraturan Presiden
PMSE	Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
PP	Peraturan Pemerintah
PPDP	Petugas Pelindungan Data Pribadi
PSGA	Public Sector Government Act
PSTE	Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik
PINJOL	Pinjaman online
POLRI	Polisi Republik Indonesia
SIM	Surat Izin Mengemudi
TFEU	Treaty on the Functioning of the European Union
UDHR	The Universal Declaration of Human Rights
US-NSTIC	United State – National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace
UU	Undang-Undang
UUD NRI 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU PDP	Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
WNI	Warga Negara Indonesia
WNA	Warga Negara Asing